

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2023
									✓				

# Jaspelkes RSUDDSR

## Bermasalah

### Rp3,5 M Jadi Temuan BPK Perwakilan Lampung

**BANDARLAMPUNG** - Sejumlah masalah di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng tahun 2022.

Pada resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terkait peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh penanggung jawab

pemeriksa, Yusnadewi, pada 27 April 2023, ada beberapa pokok temuan.

Temuan pertama terkait pengelolaan Bandar Jaya Plaza dan Kawasan Taman Wisata Kopiah Emas.

Baca  
JASPELKES |  
Hal. 4

Sambungan dari Hal. 1

BPK menilai Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan belum mengelola dua aset tersebut secara optimal dan sesuai ketentuan sehingga berisiko aset tersebut disalahgunakan atau mengalami kerusakan.

Temuan lain adalah pembayaran jasa pelayanan kesehatan (jaspelkes) pada RSUD Demang Sepuluh Raya (DSR) periode Juni sampai Desember 2022 sebesar Rp3.534.080.746,60 yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Salah satu temuan BPK Perwakilan Lampung yaitu penyediaan jasa pelayanan kesehatan pada RSUDDSR periode Juni sampai Desember 2022 sebesar Rp3.534.080.746,60 tidak sesuai ketentuan.

RSUD ini tahun anggaran 2022 menganggarkan belanja barang dan jasa senilai Rp65.699.796.598,00 dengan realisasi Rp30.295.464.323,00 atau 46,11 persen dari anggaran.

Realisasi belanja barang dan jasa RSUDDSR tahun 2022 antara lain untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan staf manajemen (PNS dan non-PNS) sesuai Perbup Nomor 68 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada BLUD RSUDDSR.

Seharusnya jasa pelayanan tersebut dibayarkan atas pendapatan yang diperoleh pada periode Januari sampai April sebesar Rp3.144.965.701,29 dan periode Mei sampai Desember sebesar Rp11.692.788.446,41.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran jasa pelayanan BLUD RSUD Demang

Sepuluh Raya menunjukkan bahwa tahun 2022 jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pada manajemen/administrasi telah dibayarkan oleh RSUD sebesar Rp 13.393.793.159,00 dan belum dibayar sebesar Rp 3.836.087.586,60.

Hal tersebut mengakibatkan penurunan kerja dan pelayanan tenaga kesehatan serta tenaga administrasi RSUDDSR yang akan berdampak pada pendapatan RSUD.

Temuan berikutnya mengenai realisasi belanja barang dan jasa. BPK menilai realisasi tidak sesuai kondisi nyatanya sebesar Rp1.990.238.574,35, termasuk di antaranya belanja untuk makan dan minum, belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor, belanja penginapan perjalanan dinas, serta belanja dana BOS. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja.

Sedangkan temuan terakhir adalah kekurangan volume sebesar Rp4.343.415.903,61 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp2.796.493.373,84 atas belanja modal 13 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada Dinas BMBK serta Dinas SDA yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada jasa konsultan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar mengusulkan perda tentang tarif sewa atas ruko, toko, kios, dan los pada Bandar Jaya Plaza dengan mempertim-

bangkan hasil penilaian dari KPKNL.

Selain itu, BPK perwakilan Lampung memerintahkan Direktur RSUDDSR pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan periode Juni-Desember 2022 sebesar Rp3.534.080.746,60 sesuai ketentuan.

BPK juga memerintahkan kepada OPD memproses indikasi kerugian daerah yang antara lain sebesar Rp1.990.238.574,35 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan penyetoran ke kas daerah atas belanja untuk makan dan minuman, belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor, belanja penginapan perjalanan dinas, serta belanja dana BOS.

Selain itu, BPK juga memerintahkan kepada Kepala Dinas BMBK memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp6.821.948.478,91 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas atas pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Juga memerintahkan, kepada Kepala Dinas SDA memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp317.960.798,54 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan jaringan irigasi. Terkait masalah ini, Sekkab Lamteng Nirlan menanggapi santai sejumlah temuan tersebut. "Setiap OPD di mana pun biasa ada temuan. Hasil temuan dan rekomendasi itu pasti kita perbaiki," kata Nirlan singkat saat dikonfirmasi, Selasa (5/9). (pip/c1/fik)